

**EFEKTIVITAS PENGADILAN PAJAK DALAM MENCIPTAKAN
KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA****Rizka Mufidah Sari¹, Shandya Alonso Eka Renanda², Aldias Gendis Syandiva³, Edwin Nurjaman⁴, Okatiyana⁵**

rizkamufidahsari21@gmail.com¹, shandyaer@students.untidar.ac.id²,
aldias.gendis.syandiva@students.untidar.ac.id³, edwi.nurjaman@students.untidar.ac.id⁴,
okatiyana@students.untidar.ac.id⁵

Universitas Tidar

Abstrak: Pengadilan Pajak memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dalam sistem perpajakan dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai seberapa baik Pengadilan Pajak mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam hal ini, sangat penting untuk menyadari bahwa pengadilan yang fungsional dapat mengurangi ambiguitas hukum yang sering dihadapi oleh wajib pajak, terutama yang berkaitan dengan interpretasi undang-undang perpajakan yang rumit dan terus berkembang. Selain itu, pengadilan pajak yang sukses dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan, yang dapat mendorong kepatuhan pajak. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Pengadilan Pajak telah berupaya untuk memberikan kesimpulan yang tidak memihak dan terbuka, masalah konsistensi dan kecepatan proses pengadilan masih tetap ada. Selain itu, variabel-variabel di luar pengadilan seperti perubahan peraturan perpajakan dan ekonomi yang tidak stabil juga berdampak pada seberapa baik pengadilan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian kami menunjukkan bahwa sistem pengadilan pajak di Indonesia harus direformasi untuk meningkatkan fungsinya dan memperkuat perlindungan hukum yang diberikan kepada para pembayar pajak.

Kata Kunci: Pengadilan Pajak, Sengketa, Kepastian Hukum.

Abstract: *The Tax Court plays an important role in maintaining fairness in the tax system and providing legal certainty for taxpayers. The purpose of this study is to assess how well the Tax Court is achieving these objectives. In this regard, it is crucial to recognize that a functional court can reduce the legal ambiguities often faced by taxpayers, especially with regard to the interpretation of complex and evolving tax laws. In addition, a successful tax court can increase public confidence in the tax system, which can encourage tax compliance. The findings show that despite the Tax Court's efforts to provide impartial and open conclusions, issues of consistency and speed of litigation still remain. In addition, extrajudicial variables such as changes in tax regulations and an unstable economy also impact on how well the courts provide legal certainty. Therefore, our research suggests that the tax court system in Indonesia should be reformed to improve its functioning and strengthen the legal protection provided to taxpayers.*

Keywords: *Tax Court, Dispute, Legal Certainty.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, Pengadilan Pajak memainkan peran penting dalam menciptakan kepastian hukum, terutama dalam hal sengketa pajak antara wajib pajak dan petugas pajak. Tujuan Pengadilan Pajak, sebagai pengadilan yang memiliki keahlian dalam masalah perpajakan, adalah untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada semua orang yang terlibat dalam proses perpajakan. Dalam konteks ini, efektivitas Pengadilan Pajak dapat dilihat dari kemampuannya dalam menyelesaikan sengketa pajak secara adil dan cepat, serta memberikan keputusan yang dapat diandalkan oleh wajib pajak dan pemerintah.

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa keinginan wajib pajak untuk membayar pajak secara signifikan dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman mereka tentang undang-undang perpajakan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi efektivitas sistem perpajakan secara keseluruhan. Dalam hal ini, Pengadilan Pajak berfungsi sebagai mediator yang membantu menyelesaikan sengketa yang muncul akibat ketidakpuasan wajib pajak terhadap keputusan otoritas pajak. Penelitian oleh Sugiono dan Supriyadi Sugiono & Supriyadi (2021) menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak yang telah diperbarui memberikan rasa kepastian hukum yang lebih baik bagi hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa pajak.

Lebih lanjut, efektivitas Pengadilan Pajak juga dapat diukur dari seberapa baik lembaga ini dalam menangani kasus-kasus yang masuk. Penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan dalam mekanisme pemilihan dan independensi hakim dapat mempengaruhi kualitas keputusan yang dihasilkan. Pada akhirnya, kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi akan dihasilkan dari pilihan-pilihan yang adil dan terbuka yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Hal ini konsisten dengan kesimpulan bahwa efisiensi penagihan pajak dengan menggunakan teknik lain, seperti penyitaan dan surat peringatan, juga membantu meningkatkan penerimaan pajak.

Dalam rangka menciptakan kepastian hukum, penting bagi Pengadilan Pajak untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap proses penyelesaian sengketa. Penelitian menunjukkan bahwa pengadilan harus mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi wajib pajak, sehingga mereka merasa aman dalam bertransaksi dan berinvestasi (Saragih, 2023). Dengan demikian, penguatan fungsi Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan yang independen dan profesional sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, efektivitas Pengadilan Pajak tidak hanya berpengaruh pada kepastian hukum, tetapi juga pada pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak yang efektif dapat berkontribusi signifikan terhadap PAD, yang merupakan sumber utama pendanaan bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pengadilan Pajak yang efektif dan efisien sangat penting untuk mendukung tujuan fiskal negara dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah (Septariani, 2019).

Dalam konteks yang lebih luas, efektivitas Pengadilan Pajak tidak hanya berpengaruh pada kepastian hukum, tetapi juga pada pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak yang efektif dapat berkontribusi signifikan terhadap PAD, yang merupakan sumber utama pendanaan bagi pemerintah. Oleh karena itu, Pengadilan Pajak yang efektif dan efisien sangat penting untuk mendukung tujuan fiskal negara dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji seberapa baik Pengadilan Pajak berkontribusi terhadap kejelasan hukum di Indonesia dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi pendapatan pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dimaksudkan agar dengan pemahaman yang lebih baik mengenai sifat dan fungsi Pengadilan Pajak, solusi dapat dikembangkan untuk meningkatkan keefektifan lembaga ini dalam menangani kesulitan-kesulitan

pajak modern.

METODE PENELITIAN

Dalam mengkaji seberapa baik Pengadilan Pajak Indonesia menciptakan kepastian hukum, metodologi penelitian yang tepat harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, dan ekonomi dari pengadilan tersebut. Pendekatan kualitatif yang menggabungkan studi kasus dan analisis deskriptif merupakan salah satu metodologi yang memungkinkan para peneliti untuk mempelajari lebih jauh tentang operasi Pengadilan Pajak dalam sistem hukum Indonesia.

PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang mengatur tentang Pengadilan Pajak menjadi dasar pendirian Pengadilan Pajak di Indonesia. Lembaga ini menangani perselisihan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan wajib pajak. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Pengadilan Pajak bertujuan untuk:

- Menjamin kejelasan hukum dengan memberikan putusan atas sengketa pajak yang tidak ambigu dan konsisten.
- Meningkatkan kepercayaan publik: Dengan membuat sistem hukum yang lebih akuntabel dan transparan.
- Memastikan bahwa semua keputusan didasarkan pada hukum yang berlaku adalah salah satu cara untuk melindungi hak-hak wajib pajak.

1. Seberapa efektifkah mekanisme pengadilan pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak secara cepat dan adil?

Ada beberapa faktor penting yang harus dicermati untuk mengetahui seberapa baik Pengadilan Pajak menangani penyelesaian sengketa pajak secara cepat dan adil. Pertama, Pengadilan Pajak memainkan peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak Indonesia. Pengadilan ini memiliki ciri khas yang berbeda dari pengadilan umum lainnya dan beroperasi sebagai lembaga peradilan yang unik yang menangani sengketa pajak. Ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak dapat dicalonkan oleh Menteri Keuangan, sesuai dengan UU No. 14 tahun 2002, yang mengatur tentang Pengadilan Pajak.

Selain itu, kualitas putusan yang dijatuhkan juga menunjukkan kemampuan Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa. Menurut penelitian, putusan Pengadilan Pajak harus memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak dan menunjukkan keterbukaan dan akuntabilitas sistem hukum. Hal ini diperlukan untuk menjamin bahwa wajib pajak mempercayai sistem perpajakan yang ada saat ini dan merasa terlindungi. Selain itu, karena jangka waktu penyelesaian yang lama dapat menyebabkan kerugian bagi wajib pajak dan menurunkan kepatuhan pajak secara keseluruhan, pengadilan harus dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat.

Pertimbangan penting lainnya dalam mengevaluasi efektivitas Pengadilan Pajak adalah unsur keadilan. Menurut penelitian, putusan Pengadilan Pajak harus sesuai dengan dasar-dasar keadilan, baik dari segi prosedur maupun isinya. Keadilan substansial berkaitan dengan hasil akhir putusan, sedangkan keadilan prosedural mencakup hak-hak wajib pajak untuk mendapatkan perlakuan yang adil berdasarkan hukum dan untuk didengar. Kepatuhan pajak dan opini publik terhadap sistem perpajakan akan menurun jika putusan pengadilan tidak mencerminkan keadilan.

Penting juga untuk mempertimbangkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi Pengadilan Pajak dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, masalah dualitas nasihat dapat berdampak pada efektivitas dan kemandirian pengadilan dalam memberikan putusan. Selain itu, kesalahpahaman antara petugas pajak dan wajib pajak sering kali mengakibatkan perdebatan yang berlarut-larut, sehingga membutuhkan proses penyelesaian sengketa yang lebih efektif (Saputro & Setiawan, 2021). Pengadilan Pajak harus terus-menerus melakukan evaluasi dan penyempurnaan prosedur operasional

agar dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan dan kejelasan hukum dalam penyelesaian sengketa pajak.

Dalam hal ini, sangat penting untuk mempertimbangkan bagaimana konsultan pajak dan keahlian perpajakan wajib pajak mempengaruhi penyelesaian sengketa pajak. Menurut penelitian, keadilan dan pemahaman yang menyeluruh tentang peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi sengketa (Yulianto et al., 2021). Oleh karena itu, untuk mendukung kemampuan Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa secara cepat dan adil, edukasi dan sosialisasi perpajakan harus diperkuat.

Secara keseluruhan, sejumlah kriteria, seperti fitur hukum, proses penyelesaian, kecepatan, dan keadilan, memengaruhi seberapa baik Pengadilan Pajak di Indonesia menangani sengketa pajak. Sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan dapat dicapai dengan perbaikan yang berkelanjutan dan peningkatan kesadaran wajib pajak akan pajak. Dengan demikian, Pengadilan Pajak dapat bekerja seefektif mungkin untuk menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan Indonesia.

Kepercayaan publik itu sendiri tertuju pada keefektifan dari Pengadilan Pajak itu sendiri. Adapun efektivitas Pengadilan Pajak dalam menciptakan kepastian hukum dapat dianalisis melalui beberapa indikator:

- **Kualitas Putusan:** Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak harus mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hal ini mencakup kejelasan dalam penjelasan hukum serta konsistensi dalam penerapan norma-norma perpajakan
- **Proses Peradilan yang Transparan:** Proses sidang yang terbuka dan dapat diakses oleh publik menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga berkontribusi pada kepastian hukum
- **Pengawasan dan Akuntabilitas:** Pengawasan internal terhadap kinerja hakim dan administrasi peradilan sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Akuntabilitas lembaga peradilan juga menjadi indikator efektivitasnya dalam menciptakan kepastian hukum
- **Pendidikan Hukum bagi Wajib Pajak:** Meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang hak dan kewajiban mereka merupakan langkah penting untuk mengurangi sengketa yang muncul. Edukasi mengenai proses peradilan pajak juga dapat membantu masyarakat memahami bagaimana cara mengakses keadilan

Di Indonesia, Pengadilan Pajak memainkan peran penting dalam menciptakan kejelasan hukum. Diharapkan Pengadilan Pajak dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dengan meningkatkan standar putusan, transparansi prosedural, dan akuntabilitas kelembagaan.

2. Sejauh mana putusan pengadilan pajak memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan otoritas pajak?

Di Indonesia, putusan pengadilan pajak sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi fiskus dan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh status Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus yang menangani sengketa pajak dan memiliki ciri-ciri dan proses yang berbeda dengan pengadilan umum lainnya. Landasan hukum bagi Pengadilan Pajak untuk dapat menyelesaikan sengketa pajak secara adil dan terbuka adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Kunci dari putusan Pengadilan Pajak adalah kemampuannya untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada wajib pajak. Putusan Pengadilan Pajak mengklarifikasi dan menyangkal klaim wajib pajak selain menyelesaikan sengketa.. Sebagai contoh, putusan hakim dalam menangani sengketa pajak yang disebabkan oleh ketidakjelasan peraturan perpajakan sangat penting untuk

menciptakan rasa keadilan bagi wajib pajak (Saputro & Setiawan, 2021).¹

Selain itu, hak-hak wajib pajak juga dilindungi oleh putusan Pengadilan Pajak. Dalam situasi ini, pilihan yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang kuat dan prosedur pemeriksaan yang terbuka dapat memberikan perlindungan hukum yang adil (Wagner et al., 2022). Pengadilan Pajak bekerja untuk menjamin bahwa setiap putusan memenuhi persyaratan substantif dan prosedural, sehingga memberikan rasa keadilan yang lebih besar bagi semua pihak yang terkait (Wagner et al., 2022; Hariyasin, 2023).

Meskipun Pengadilan Pajak memainkan peran penting dalam menciptakan kepastian hukum, ada beberapa kesulitan praktis. Pengadilan Pajak menghadapi keterbatasan yudisial, seperti yang berkaitan dengan aksesibilitas bagi wajib pajak yang ingin mengajukan banding atau keberatan (Hamdan et al., 2023). Hal ini mengimplikasikan bahwa meskipun putusan Pengadilan Pajak dapat memberikan kepastian hukum, prosedurnya masih perlu ditingkatkan untuk menjamin bahwa setiap wajib pajak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan.

Penting untuk ditekankan dalam hal ini bahwa putusan dari Pengadilan Pajak juga menjadi preseden untuk kasus-kasus di masa depan. Putusan hakim dalam satu kasus dapat berdampak pada bagaimana kasus-kasus serupa ditangani di masa depan. Oleh karena itu, putusan yang dihasilkan harus konsisten dan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang dapat dipahami (Hariyasin, 2023).² Sebagai hasilnya, kepatuhan wajib pajak akan meningkat dan sistem perpajakan akan menjadi lebih terbuka dan dapat diprediksi.

Selain itu, otoritas pajak secara signifikan dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Pajak. Putusan yang tegas dan tidak ambigu membantu otoritas pajak untuk lebih memahami batas-batas kewenangan mereka dalam menegakkan hukum pajak. Hal ini sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan menjamin bahwa petugas pajak selalu bertindak sesuai dengan hukum (Erwiningsih, 2022).³

Dalam konteks ini, sangat penting untuk diingat bahwa putusan dari Pengadilan Pajak digunakan untuk meningkatkan standar undang-undang perpajakan di Indonesia selain sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa. Pengadilan Pajak dapat membantu perbaikan sistem perpajakan secara umum dengan memberikan kritik yang bermanfaat melalui putusannya (Rosdiana et al., 2020).⁴

Selain itu, putusan Pengadilan Pajak juga membantu wajib pajak memahami tanggung jawab perpajakan mereka dalam konteks kejelasan hukum. Wajib pajak dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak, tanggung jawab, dan konsekuensi hukum atas tindakan mereka dengan adanya putusan yang jelas (Saputro & Setiawan, 2021). Akibatnya, dapat mengurangi perselisihan di masa depan dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Namun demikian, meskipun putusan Pengadilan Pajak memiliki banyak manfaat, masih ada beberapa kendala yang harus diatasi. Misalnya, wajib pajak tidak selalu setuju dengan putusan yang dijatuhkan, yang dapat menimbulkan perselisihan dan mengikis kepercayaan terhadap sistem peradilan pajak (Erwiningsih, 2022; Hariyasin, 2023). Oleh karena itu, Pengadilan Pajak harus terus berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam prosedur pengambilan keputusan.

Terkait putusan Pengadilan Pajak, faktor sosialisasi dan edukasi juga perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kejelasan hukum. Pemberian informasi yang mudah dipahami oleh wajib pajak

¹ Saputro, H. and Setiawan, B. (2021). Upaya hukum wajib pajak terhadap surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. *Educoretax*, 1(1), 59-81. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i1.9>

² Hariyasin, H. (2023). Kekuatan eksekutorial putusan majelis pengadilan pajak terhadap sengketa pajak di Indonesia. *Mimbar Keadilan*, 16(2), 269-276. <https://doi.org/10.30996/mk.v16i2.8909>

³ Erwiningsih, W. (2022). Implementasi penyelesaian sengketa pajak pada pengadilan pajak Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 248-262. <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1585>

⁴ Rosdiana, H., Tambunan, M. R., & Hifni, I. (2020). Penyempurnaan hukum formal perpajakan terkait tata cara perpajakan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 215-240. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.13441>

diharapkan dapat mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kepatuhan pajak (Rosdiana et al., 2020).

Pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Pajak Indonesia memainkan peran penting dalam memberikan kejelasan hukum bagi otoritas pajak dan wajib pajak. Terlepas dari kesulitan-kesulitan yang ada, inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pemahaman dalam pengambilan keputusan akan sangat membantu dalam pengembangan struktur perpajakan yang lebih adil dan efisien di Indonesia. Oleh karena itu, Pengadilan Pajak memainkan peran penting dalam menegakkan hukum pajak Indonesia, selain sebagai badan penyelesaian sengketa.

Dalam melaksanakan peran pentingnya, pengadilan pajak tentu menghadapi beberapa tantangan. Diantaranya yaitu;

- **Keterbatasan Sumber Daya Manusia:** Kualitas hakim dan staf pengadilan yang kurang memadai dapat mempengaruhi kualitas putusan.
- **Birokrasi yang Rumit:** Proses administrasi yang panjang sering kali membuat wajib pajak enggan untuk mengajukan sengketa.
- **Persepsi Negatif Terhadap Lembaga Hukum:** Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan seringkali dipengaruhi oleh kasus-kasus korupsi atau ketidakadilan yang terjadi di luar konteks perpajakan.

Namun, tantangan-tantangan yang ada perlu ditangani secara serius agar tujuan dari keberadaan pengadilan ini dapat tercapai secara optimal. Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan reformasi birokrasi juga menjadi kunci untuk mencapai efektivitas tersebut.

3. Bagaimana sistem peradilan pajak di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki sistem perpajakan yang maju?

Dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki sistem perpajakan yang lebih maju, sistem peradilan pajak di Indonesia berbeda dan beragam. Dalam konteks ini, membandingkan prosedur penyelesaian sengketa pajak di Indonesia dengan negara-negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan Eropa sangatlah penting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan analisis menyeluruh mengenai kesulitan dan cara kerja sistem peradilan pajak Indonesia, serta perbandingannya dengan praktik-praktik terbaik di dunia.

Undang-Undang Perpajakan mengatur sistem peradilan pajak Indonesia, yang mencakup Pengadilan Pajak, sebuah pengadilan yang memiliki keahlian dalam menyelesaikan masalah-masalah pajak. Meskipun ada proses banding ke Mahkamah Agung, keputusan Pengadilan Pajak bersifat final dan dapat ditegakkan, dan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antara wajib pajak dan petugas pajak. Meskipun kehadiran Pengadilan Pajak diharapkan dapat memberikan keadilan bagi mereka yang mencarinya, banyak pihak yang berpendapat bahwa sistem ini belum sepenuhnya independen dan efektif, dan terkadang dipengaruhi oleh agenda birokrasi dan politik.

Sistem peradilan pajak biasanya lebih terbuka dan menawarkan lebih banyak variasi prosedur penyelesaian sengketa alternatif di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Australia. Misalnya, ada beberapa jenis penyelesaian sengketa alternatif (ADR) yang tersedia di Australia yang memungkinkan otoritas pajak dan wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses pengadilan yang berlarut-larut dan mahal. Selain mengurangi beban pengadilan, prosedur ini juga meningkatkan kepuasan wajib pajak terhadap penyelesaian sengketa. Sebaliknya, di Amerika Serikat terdapat sistem yang memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, sebuah organisasi profesional yang menangani masalah pajak. Untuk menjamin keadilan dan keterbukaan, prosedur ini diatur secara ketat (Lederman, 2012).

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum di kalangan wajib pajak merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi sistem peradilan pajak di Indonesia. Banyak wajib pajak yang tidak menggunakan prosedur penyelesaian sengketa yang ada karena mereka tidak mengetahui hak-hak

mereka (Sa'adah, 2019; Sinaga, 2022). Hal ini berbeda dengan negara-negara industri, di mana wajib pajak memiliki akses yang lebih besar terhadap edukasi dan informasi perpajakan, serta berbagai lembaga yang menawarkan bantuan hukum (Li, 2018). Selain itu, birokrasi yang rumit dan prosedur pengambilan keputusan yang panjang seringkali menghambat penyelesaian masalah perpajakan di Indonesia, sehingga membuat wajib pajak bingung (Zulfiqar, 2023).

Sebelum melalui sistem hukum, prosedur penyelesaian sengketa pajak di Indonesia masih bergantung pada prosedur administratif. Wajib pajak harus menyelesaikan prosedur keberatan administratif sebelum mengajukan kasus ke Pengadilan Pajak, yang sering dianggap sebagai langkah yang melelahkan dan tidak efektif (Sa'adah, 2019; Sinaga, 2022). Terdapat metode yang lebih fleksibel dan bijaksana untuk menyelesaikan sengketa pajak di negara-negara lain, termasuk Eropa, di mana pihak-pihak yang tidak setuju dapat memilih untuk tidak mengikuti proses hukum yang berlarut-larut dengan menggunakan mediasi atau arbitrase (Kovač, 2019; Li, 2018).

Indonesia juga menghadapi kesulitan baru dalam menyelesaikan sengketa pajak dalam konteks industri e-commerce yang berkembang pesat. Ada peluang lebih besar untuk terjadinya konflik pajak seiring dengan meningkatnya transaksi online, dan prosedur penyelesaian sengketa yang ada saat ini mungkin tidak cukup untuk menangani komplikasi-komplikasi baru tersebut (Aziz & Hidayah, 2020). Untuk mengatasi masalah terkait perdagangan elektronik, negara-negara maju telah mulai membuat prosedur penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel, termasuk penggunaan teknologi untuk mempercepat prosedur penyelesaian sengketa (Aziz & Hidayah, 2020; Kovač, 2019).

Penggunaan teknologi dalam prosedur penyelesaian sengketa juga harus dipertimbangkan oleh sistem peradilan pajak Indonesia. Teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan keterbukaan proses peradilan pajak serta memudahkan wajib pajak untuk mendapatkan informasi mengenai hak dan tanggung jawabnya (Aziz & Hidayah, 2020; Hidayah et al., 2018). Indonesia dapat belajar dari keberhasilan penerapan sistem berbasis teknologi di negara lain yang memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan masalah secara online dan melacak perkembangannya secara real-time (Aziz & Hidayah, 2020; Li, 2018).

Pengembangan metode mediasi untuk penyelesaian sengketa pajak di Indonesia memiliki banyak harapan. Mediasi dapat membantu menjaga hubungan positif antara wajib pajak dan otoritas pajak serta menjadi alternatif yang lebih bersahabat dan efektif daripada litigasi (Hidayah et al., 2018; Kovač, 2019). Mediasi telah dimasukkan ke dalam sistem penyelesaian sengketa pajak di negara-negara maju, dan temuan-temuan menunjukkan bahwa mediasi dapat menurunkan biaya pengadilan dan meningkatkan kepuasan wajib pajak (Kovač, 2019; Li, 2018).

Secara keseluruhan, meskipun sistem peradilan pajak Indonesia memiliki beberapa keunggulan, seperti adanya Pengadilan Pajak khusus, masih banyak masalah yang harus diselesaikan untuk meningkatkan efisiensi dan kesetaraan penyelesaian sengketa pajak. Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan menciptakan sistem peradilan pajak yang lebih responsif dan mudah beradaptasi dengan menyerap praktik-praktik terbaik dari negara lain.

KESIMPULAN

Khususnya dalam hal penyelesaian sengketa pajak antara wajib pajak dan otoritas pajak, Pengadilan Pajak Indonesia sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum. Dalam hal ini meliputi peran penting dari pengadilan pajak agar memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada semua orang yang terlibat dalam proses perpajakan. Proses ini bekerja dengan baik untuk menyelesaikan sengketa pajak dengan cepat dan adil dan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya oleh pemerintah dan wajib pajak. Supaya dapat menciptakan keputusan yang konsisten, proses peradilan yang transparan, serta terciptanya akuntabilitas dan pengawasan. Dengan begitu pengadilan pajak di Indonesia dapat menciptakan perlindungan hak-hak pajak bagi wajib pajak yang

tengah bersengketa di pengadilan pajak akibat terbitnya suatu keputusan direktur jenderal pajak yang dianggap merugikan wajib pajak.

Saran

Dengan meningkatkan standar putusan dalam pengadilan pajak maka akan terciptanya kepastian hukum yang tercipta dan akan terciptanya pula transparansi dalam prosedur mekanisme pengadilan pajak di Indonesia dalam menciptakan putusan dalam sengketa pajak supaya terciptanya kepastian hukum bagi wajib pajak. Dan juga dengan melakukan evaluasi serta perbaikan di bagian apa saja yang perlu diperbaiki dalam pengadilan pajak di Indonesia, supaya putusan yang diputuskan melalui pengadilan pajak di Indonesia dapat menciptakan kepastian hukum serta memutuskan suatu sengketa dengan hasil akhir yang berkualitas dan tidak merugikan bagi masing-masing pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeline, I. and Karina, R. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak umkm di kota batam. *Akuntabel*, 19(2), 242-253. <https://doi.org/10.30872/jakt.v19i2.11087>
- Aji, W. K., Khosafiah, R. K., Jusikusuma, T. D., & Irawan, F. (2022). Penyelesaian sengketa pajak atas gugatan dan sanggahan: suatu perspektif keadilan. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 80-88. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1601>
- Aziz and Hidayah "PERLUNYA PENGATURAN KHUSUS ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) DI INDONESIA UNTUK FASILITASI PENYELESAIAN SENKETA E-COMMERCE" *Jurnal rechts vinding media pembinaan hukum nasional* (2020) doi:10.33331/rechtsvinding.v9i2.449
- Erwiningsih, W. (2022). Implementasi penyelesaian sengketa pajak pada pengadilan pajak indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 248-262. <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1585>
- Hariyasin, H. (2023). Kekuatan eksekutorial putusan majelis pengadilan pajak terhadap sengketa pajak di indonesia. *Mimbar Keadilan*, 16(2), 269-276. <https://doi.org/10.30996/mk.v16i2.8909>
- Hidayah et al. "MEDIATION FOR INDONESIAN TAX DISPUTES: IS IT POTENTIAL ALTERNATIVE STRATEGY FOR RESOLVING INDONESIAN TAX DISPUTES?" *Indonesia law review* (2018) doi:10.15742/ilrev.v8n2.486
- Kovač "Potencijali i granice mehanizama prevencije dan alternativnog rješavanja poreznih sporova" *Zbornik pravnog fakulteta sveučilišta u rijeci* (2019) doi:10.30925/zpfsr.39.4.3
- Lederman "WHAT DO COURTS HAVE TO DO WITH IT?: THE JUDICIARY'S ROLE IN MAKING FEDERAL TAX LAW" *National tax journal* (2012) doi:10.17310/ntj.2012.4.09
- Li "CURRENT TRENDS IN CASE LAW ON CROSS-BORDER TAX DISPUTES IN CHINA" *Herald of the euro-asian law congress* (2018) doi:10.34076/2619-0672-2018-2-37-47
- Noone and Ojelabi "Alternative dispute resolution and access to justice in Australia" *International journal of law in context* (2020) doi:10.1017/s1744552320000099
- Rifandanu, F. (2024). Implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor 26/puu-xxi/2023 terhadap pembinaan pengadilan pajak. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 6(1), 145-161. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.3270>
- Rumadan "EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA" *Jurnal hukum dan peradilan* (2012) doi:10.25216/jhp.1.1.2012.35-62
- Sa'Adah "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia" *Administrative law & governance journal* (2019) doi:10.14710/alj.v2i1.19-33
- Saputro, H. and Setiawan, B. (2021). Upaya hukum wajib pajak terhadap surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. *Educoretax*, 1(1), 59-81. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i1.9>
- Sinaga "IS ADMINISTRATIVE JUSTICE A PROBLEM-SOLVING OF TAX DISPUTE?" *Journal of tax law and policy* (2022) doi:10.56282/jtlp.v1i1.63
- Yulianti, A. and Kurniawan, A. (2019). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan persepsi keadilan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak melalui kepercayaan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 5(1). <https://doi.org/10.25134/jrka.v5i1.1929>
- Yulianto, R. A. B., Darmayanti, N., & Rosyida, I. (2021). Pengaruh pemahaman atas self assessment system, keadilan dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak pada umkm di kabupaten bojonegoro. *Jurnal*

Proaksi, 8(2), 512-522. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.2198>

Zulfiqar "A qualitative analysis on transfer pricing tax audit performance in Indonesia" *Akurasi jurnal riset akuntansi dan keuangan* (2023) doi:10.36407/akurasi.v5i1.805